

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jawaban yang diberikan terhadap pengukuran variabel pertanggungjawaban APBDesa di Desa Kecamatan Nekamese adalah 70,1 dengan kategori baik. Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban APBDesa pada desa di kecamatan nekamese cukup baik; Terhadap pengukuran variabel kualitas sumber daya manusia adalah 70,34% dengan kategori baik. Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam kategori cukup baik; Terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 74,4% dengan kategori baik. Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada desa di wilayah kecamatan nekamese dalam kategori cukup baik; Terhadap variabel sistem pengendalian intern adalah 72,2%. Hasil analisis deskriptif ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pada desa di kecamatan nekamese cukup baik. Pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban APBDesa. Hasil temuan ini sejalan dengan Sembiring (2013). Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi computer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan APBDesa meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah desa dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

2. Hasil analisis Regresi linier berganda menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang diukur dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertanggungjawaban APBDesa di desa wilayah kecamatan nekamese. Dari ketiga variabel independen tersebut, variabel sistem pengendalian intern secara parsial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertanggungjawaban APBDesa di desa wilayah kecamatan nekamese, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,493. Nilai koefisien regresi ini lebih besar dari nilai koefisien variabel lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya pertanggungjawaban APBDesa dengan

lebih memprioritaskan variabel sistem pengendalian intern untuk mendukung pencapaian pertanggungjawaban APBDesa di desa wilayah kecamatan nekamese kabupaten kupang.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan menjelaskan bahwa sekitar 91% variasi dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban APBDesa. Hasil uji F juga menyebutkan bahwa ketiga variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban APBDesa di wilayah kecamatan nekamese kabupaten kupang. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas ini memiliki sumbangan yang cukup tinggi dan memenuhi asumsi sebagai model yang layak dalam sebuah penelitian sehingga dalam pertanggungjawaban APBDesa di wilayah kecamatan nekamese kabupaten kupang harus diprioritaskan.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang perlu disarankan, antara lain:

1. Diharapkan agar pemerintah desa-desa yang berada di Kecamatan Nekamese hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu dengan mengikutsertakan

perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Untuk itu, perlu dibuatkan pedoman penempatan staf secara benar seperti jumlah personil yang ditempatkan pada setiap kantor desa di Kecamatan Nekamese sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berlatar belakang pendidikan akuntansi/keuangan dan manajemen, mempunyai pengalaman pada bidang keuangan, mampu mengoperasikan computer dan menggunakan aplikasi keuangan serta memiliki sertifikat pelatihan keuangan. Pemerintah desa perlu melakukan kajian internal secara mandiri mengenai kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia khususnya terkait dengan tujuan pencapaian tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Institusi desa juga perlu menganggarkan sejumlah dana untuk pelatihan staf terutama yang sedang menduduki jabatan tersebut ataupun kaderisasi bagi anggota lain.

2. Pemerintah desa hendaknya memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Untuk itu, diharapkan agar Camat Nekamese menambah pengadaan

perangkat computer yang terbaru atau ter up date, minimal sudah menggunakan prosesor Core I3 keatas dengan memory ram 4 pada satuan kerja di wilayah desa-desa di Kecamatan Nekamese yang selama ini menggunakan peralatan pribadi untuk melaksanakan kegiatan operasional, melakukan kerjasama dengan pihak penyedia layanan komunikasi untuk membangun infrastruktur jaringan komunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau serta pemasangan internet LAN maupun WAN dan menginstal aplikasi keuangan pada semua computer yang ada di bagian keuangan.

3. Diharapkan agar pimpinan Kecamatan Nekamese dan seluruh pegawai menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan erilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat serta harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam. Sistem pengendalian interen yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperbesar jumlah sampel dan melengkapi dengan metode lain. Misalnya dengan wawancara agar informasi yang diperoleh dari responden lebih lengkap
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah sehingga dapat menambah variasi dalam penelitian selanjutnya, misalnya kapasitas sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan pengawasan keuangan pemerintah desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti transparansi (keterbukaan) dan keakuratan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin. (2015). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arikunto, S. (2006). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonim. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Conyers , W. (1994). *Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (4th ed.)*. Semarang: Undip.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T.H. (1996). *Manajemen (2nd ed.)*. Yogyakarta: BPFEUGM.
- Haryanto, S., Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kantaprawira, R. (1999). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- LAN dan BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. In *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (Modul 1 dari 5). Jakarta: LAN dan BPKP.

- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- _____. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maryunani. (2006). *Perspektif Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Purwanto, M.N. (2008). *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif (12th ed)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GavaMedia.
- _____. (2011). *Memahami Good Governance: dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: GavaMedia.
- Sukesi. (2007). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Sujamto. (1996). *Aspek-Aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Widjaya, HAW. (2005a). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel

- Ariesta, Fadila (2013), "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)", *Jurnal Akuntansi*, Universitas Negeri Padang.
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah: Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Bukittinggi. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-27.
- Astrawan, K.P., Wahyuni, M.A., & Herawati, N.T. (2016). Pengaruh sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 6(3), 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v6i3.8802>.
- Husna, F. (2013). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah: Studi empiris pada SKPD pemerintah Kota Padang Panjang). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1-21.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah: Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 11.
- Lismawati. (2011). Pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(1), 23-31.
- Primayana, K.H., Atmadja, A.T., & Darmawan, N.A.S. (2014). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah: Studi pada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2492>.
- Putri, R.D. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan PEMDA: Study empiris pada satuan kerja perangkat

daerah di Kabupaten Solok. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 134-149.

Tesis

Anisatin, N., & Trisnawati, R. (2015). *Pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada DPPKAD eks Karesidenan Pati* (Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Retrieved from: <http://eprints.ums.ac.id/37341/>.

Sakti, Daru, 2008, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyar Kab. Gorobongan, 2008", *Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM* (tidak dipublikasikan).

Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008* (Master thesis, Universitas Diponegoro Semarang). Retrieved from: <http://eprints.undip.ac.id/24290/>.

Prpto, S. (2010). *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah: Studi pada pemerintah Kabupaten Sragen* (Master tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta). Retrieved from: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/13321>.

Peraturan Perundang-Undangan

Menteri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Menteri. (2014). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Menteri. (2015). *Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.

Menteri. (2015). *Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Menteri. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, PemantauandanEvaluasiDanaDesa.*

Presiden. (2014). *PeraturanPemerintahNomor43/2014 tentangPeraturanPelaksanaan UU6/2014danPP 47/2015tentangPerubahanatasPP43/2014.*

Presiden. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentangDesa.*

RepublikIndonesia. (2004). *Undang-undangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah.*

RepublikIndonesia. (2014). *Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa.*